

# INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) BALAI LABKESMAS AMBON. 2025



Balai Labkesmas Ambon  
Jalan Tabea Jouw - Kopertis, Sirimau, Kota Ambon

[@labkesmasambon](#)

**DAFTAR ISI**

DAFTAR ISI .....	1
I. LATAR BELAKANG .....	2
II. MAKSDUD DAN TUJUAN.....	4
II.1. Maksud .....	4
II.2. Tujuan.....	4
III. IKU/IKK TAHUN 2025.....	5
IV. ANALISIS KESESUAIAN TUPOKSI .....	6
V. GAMBARAN KESESUAIAN DENGAN RAK.....	9
VI. ANALISIS SMART .....	11
VII. KESIMPULAN.....	15

## I. LATAR BELAKANG

Dalam kerangka pembangunan good governance, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Orientasi pada input, terutama uang, seperti selama ini dijalankan, hendak ditinggalkan. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kepentingan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Output merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang, dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedangkan outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Output dan outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja, bukan kemampuan menyerap anggaran seperti persepsi yang ada selama ini. Namun demikian uang tetap merupakan faktor penting untuk mencapai kinerja tertentu berupa baik output maupun outcome. Money follows function, bukan sebaliknya, karena itu prinsip dasar manajemen berbasis kinerja adalah no performance, no money.

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka upaya mewujudkan good governance dan sekaligus result oriented government, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan di bawahnya. Dengan demikian, ke depan anggaran negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja, atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat. Dengan anggaran berbasis kinerja ini akan dapat dilakukan penelusuran alokasi anggaran ke kinerja yang direncanakan, dan pada setiap akhir tahun anggaran juga dapat dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kinerjanya. Hal ini akan memudahkan evaluasi untuk mengetahui cost efficiency dan cost effectiveness anggaran instansi bersangkutan, sekaligus memudahkan pencegahan dan deteksi kebocoran anggaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing tingkatan (level) secara berjenjang.

Indikator Kinerja Utama (IKU) instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome). Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tingkat Kementerian Negara / Departemen / LPND / Pemprov/ Pemkab / Pemkot sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing. IKU pada unit kerja setingkat Eselon I adalah indikator hasil (outcome) dan atau keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja dibawahnya, sedangkan IKU pada unit organisasi setingkat Eselon II/Satuan Kerja/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output).

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) secara formal dalam suatu lembaga pemerintah, diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Perlunya ditetapkan indikator-indikator kinerja adalah agar terdapat proses yang wajar yang digunakan baik oleh para pelaksana dan pimpinan dalam mengelola usaha-usaha organisasi instansi agar mencapai hasil atau berkinerja tinggi. Logika pentingnya indikator kinerja ini dapat dijelaskan mulai dari pentingnya pengukuran kinerja sampai pada hal-hal yang rinci dalam mengelola organisasi secara umum agar berjalan efektif & efisien.

Bertitik tolak dari uraian di atas maka Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Ambon sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium sesuai Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat juga berupaya untuk menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan

Penjabaran dari analisis SMART terhadap indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

NO	IKU/IKK	SPESIFIK (SPECIFIC)	TERUKUR (MEASURABLE)	DAPAT DICAPAI (ACHIEVABLE)	RELEVAN (RELEVANT)	TERIKAT WAKTU (TIME- BOUND)
1	Jumlah Rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium yang dihasilkan	Jumlah rekomendasi hasil kegiatan surveilans yang ditindaklanjuti	Diukur dengan membandingkan Jumlah rekomendasi hasil kegiatan surveilans yang dihasilkan dengan Jumlah rekomendasi hasil kegiatan surveilans yang dindaklanjuti	Adanya dukungan anggaran monev dan PKS dengan stakeholder	Mendukung Pencapaian Persentase Labkesmas yang melaksanakan fungsi surveilans penyakit dan faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium sesuai standar	1 Tahun
2	Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/atau sampel	Jumlah Spesimen Klinis dan Lingkungan yang diperiksa dan diterbitkan hasilnya	Diukur dengan membandingkan Jumlah Spesimen Klinis dan Lingkungan yang diperiksa dan diterbitkan hasilnya dengan Target 10.000 spesimen/sampel	Adanya Penunjukan sebagai Laboratorium Rujukan ILI SARI, TB, Malaria, Covid 19, Mpox, HPV DNA, Hipersensivitas Obat Kusta Dapson, dan Laboratorium Tersertifikasi ISO 17025	Mendukung Pencapaian Persentase Labkesmas yang melaksanakan pemeriksaan specimen klinis dan lingkungan sesuai standar	1 Tahun
3	Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas	Seluruh Labkesmas Tingkat 3, 2 yang dilakukan bimbingan dalam periode 1 Tahun	Diukur dengan membandingkan jumlah labkesmas tingkat 3 dan 2 di regional 10 dengan jumlah labkesmas tingkat 3 dan 2 di regional 10 yang mengikuti bimbingan teknis dalam 1 tahun	Labkesmas Ambon sebagai Laboratorium Regional atau Tingkat 4 yang diberikan tugas membina Labkesmas Tingkat 3 dan 2	Mendukung Pencapaian Persentase Labkesmas yang dilakukan pembinaan secara rutin dan berjenjang	1 Tahun
4	Mengikuti dan lulus Pemantapan	Jumlah PME yang diikuti dan Lulus	Diukur dengan menghitung Jumlah PME	Adanya dukungan anggaran dan	Persentase Labkesmas yang	1 Tahun



	Mutu Eksternal (PME)		diikuti dan Lulus dalam 1 Tahun	standar mutu laboratorium sesuai SNI ISO	dilakukan pembinaan secara rutin dan berjenjang	
5	Jumlah MoU/ PKS/ Forum Kerjasama atau Forum Koordinasi dengan jejaring, lembaga / institusi nasional dan / atau internasional	Jumlah MoU/ PKS/ Forum Kerjasama atau Forum Koordinasi dengan jejaring, lembaga / institusi nasional dan / atau internasional yang di tandatangani dan berlaku dalam 1 Tahun	Diukur dengan menghitung Jumlah MoU/ PKS/ Forum Kerjasama atau Forum Koordinasi dengan jejaring, lembaga / institusi nasional dan / atau internasional yang di tandatangani dan berlaku dalam 1 Tahun	Adanya Penunjukan sebagai Laboratorium Rujukan ILI SARI, TB, Malaria, Covid 19, Mpox, HPV DNA, Hipersensivitas Obat Kusta Dapson, dan Laboratorium Tersertifikasi ISO 17025	Mendukung Pencapaian Persentase Labkesmas yang melaksanakan pemeriksaan specimen klinis dan lingkungan sesuai standar	1 Tahun
6	Labkesmas memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepositori	Persentase Labkesmas yang telah memenuhi standar pengelolaan biorepository	Diukur berdasarkan kriteria ketersediaan Peralatan, Bahan Habis Pakai, Ruangan dan personil yang terlatih dengan persentase masing – masing item adalah 25 % apabila terpenuhi	Adanya Penunjukan sebagai Laboratorium Rujukan ILI SARI, TB, Malaria, Covid 19, Mpox, HPV DNA, Hipersensivitas Obat Kusta Dapson, dan Laboratorium Tersertifikasi ISO 17025	Mendukung Pencapaian Persentase Labkesmas yang melaksanakan fungsi surveilans penyakit dan faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium sesuai standar	1 Tahun
7	Jumlah Labkesmas sesuai standar di wilayah binaan	Jumlah Labkesmas tingkat 3,2 dan 1 yang dilakukan pemetaan	Diukur dengan membandingkan jumlah Labkesmas tingkat 3, 2 dan 1 di regional 10 sebanyak 33 Labakesmas	Labkesmas Amboin sebagai Laboratorium Regional atau Tingkat 4 yang diberikan tugas membina Labkesmas Tingkat 3 dan 2	Mendukung pencapaian jumlah Labkesmas yang sesuai standar di wilayah binaan	1 Tahun
8	Persentase Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Anggaran Satker dalam satu Tahun Anggaran	Diukur dengan membandingkan Realisasi Anggaran Satker dalam satu Tahun dengan	Adanya dukungan APBN melalui DIPA Balai Labkesmas Amboin	Mendukung Pelaksanaan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di	1 Tahun

			Total Pagu Anggaran satker dalam satu Tahun		Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas	
9	Nilai Kinerja Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran berdasarkan Aplikasi SMART DJA	Diukur dari Nilai pada Aplikasi SMART DJA	Adanya dukungan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas	1 Tahun
10	Kinerja implementasi WBK Satker	Nilai Implementasi WBK Satker berdasarkan hasil penilaian Mandiri/ Pendahuluan/ Penilaian TPI pada Tahun berjalan	Diukur berdasarkan hasil penilaian Implementasi WBK Satker berdasarkan hasil penilaian Mandiri/ Pendahuluan/ Penilaian TPI pada Tahun berjalan	Adanya dukungan melalui Peraturan	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas	1 Tahun
11	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Jumlah ASN (PNS dan PPPK) yang ditingkatkan kapasitasnya minimal 20 JPL dalam 1 Tahun	Diukur berdasarkan akumulasi Jumlah ASN (PNS dan PPPK) yang ditingkatkan kapasitasnya minimal 20 JPL dalam 1 Tahun	Adanya dukungan anggaran pelatihan dalam DIPA, webinar dan diklat dari pembiayaan pihak ke 3	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas	1 Tahun



laboratorium kesehatan masyarakat, yaitu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan laboratorium, mendukung surveilans penyakit, dan membangun kesiapsiagaan laboratorium dalam menghadapi ancaman penyakit.

Indikator kinerja utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama.

Dengan merumuskan indikator kinerja utama, instansi pemerintah bisa mengetahui kinerja mereka selama ini. Selain itu, indikator kinerja utama juga dapat meningkatkan kinerja mereka untuk ke depannya. Sehingga mereka pun bisa meraih tujuan, sasaran, dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

## **II. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **II.1. Maksud**

Indikator Kinerja Utama dimaksudkan sebagai ukuran yang dapat menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau kegiatan. Selain itu pula IKU berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai atau tidak

### **II.2. Tujuan**

1. Untuk mendapatkan ukuran sejauh mana keberhasilan dan pencapaian yang telah diraih organisasi tersebut selama beberapa waktu terakhir. Ukuran tersebut nantinya akan dijadikan patokan untuk meningkatkan kualitas kinerja instansi tersebut, utamanya kinerja para karyawan.
2. Untuk mendapatkan informasi penting soal kinerja karyawan selama ini. Nantinya, informasi tersebut akan dijadikan salah satu pedoman dalam menyusun manajemen kerja yang baik.

### III. IKU/IKK TAHUN 2025

**Tabel 1**  
**Indikator Kinerja Kegiatan Balai Labkesmas Ambon Tahun 2025**

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	OUTPUT	TARGET
1	Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	1 <b>Persentase Labkesmas yang melaksanakan fungsi surveilans penyakit dan faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium sesuai standar</b>  2 <b>Persentase Labkesmas yang melaksanakan pemeriksaan specimen klinis dan lingkungan sesuai standar</b>  3 <b>Persentase Labkesmas yang dilakukan pembinaan secara rutin dan berjenjang</b>		
		1 Jumlah Rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium  2 Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/atau sampel  3 Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas  4 Mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME)  5 Jumlah MoU/PKS/Forum Kerjasama atau Forum Koordinasi dengan jejaring, lembaga/institusi nasional dan/atau internasional  6 Labkesmas memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepositori  7 Jumlah Labkesmas sesuai standar di wilayah binaan	Layanan deteksi dini dan respon kejadian penyakit menular  Pengadaan Alat dan Bahan Laboratorium  Pembinaan, Pendampingan, Dan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat  Pemantapan Mutu Eksternal  Sosialisasi dan Diseminasi Laboratorium Kesehatan Masyarakat (LP2)  Pemeliharaan Alat Kesehatan Laboratorium Kesehatan Masyarakat  Koordinasi dalam Penguatan Labkesmas (LP2)	3 layanan  5 paket  22 Daerah  4 Lembaga  100 Orang  5 Paket  2 kegiatan
2	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program Ditjen	1 <b>Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat</b>  2 <b>Nilai Kinerja Penganggaran Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat</b>		

Kesehatan Masyarakat	1	Percentase realisasi anggaran	Layanan Manajemen Keuangan	2 Dokumen
			Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2 Dokumen
			Layanan Perencanaan dan Penganggaran	2 Dokumen
			Koordinasi LP/LS evaluasi program	2 kegiatan
	2	Nilai Kinerja Anggaran	Layanan BMN	1 layanan
			Layanan Umum	1 layanan
			Layanan Perkantoran	12 layanan
			Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	2 dokumen
			Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1 layanan
			Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 layanan
	3	Kinerja Implementasi WBK Satker	Layanan Manajemen SDM	2 orang
			Layanan Pendidikan dan Pelatihan	10 orang
			Pelatihan Bidang Kesehatan	65 orang
	4	Percentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Layanan Manajemen SDM	2 orang

#### IV. ANALISIS KESESUAIAN TUPOKSI

Tugas merupakan salah satu elemen penting dalam organisasi. Menurut kamus lengkap bahasa Indonesia, tugas adalah kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang dibebankan, maupun perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu. Dari sudut pandang organisasi tugas-tugas didefinisikan sebagai perwujudan dari kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap anggota organisasi sebagai upaya dalam pencapaian tujuan.

Tugas pokok dan fungsi sangat berkaitan erat dengan efektifitas kerja organisasi. Menurut Robbins (1995), keefektifan didefinisikan sejauh mana organisasi dapat mewujudkan tujuan-tujuannya. Berdasarkan penjelasan tersebut suatu organisasi perlu mengetahui kesesuaian antaran indikator kinerja dengan tugas dan fungsi organisasi sebagaimana tergambar pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2**  
**Kesesuaian IKK Dengan Tugas Pokok dan Fungsi Balai Labkesmas Ambon**

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	OUTPUT	TUGAS dan FUNGSI (Sesuai Permenkes 25 Tahun 2023)
Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	1 <b>Percentase Labkesmas yang melaksanakan fungsi surveilans penyakit dan faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium sesuai standar</b> 2 <b>Percentase Labkesmas yang melaksanakan pemeriksaan specimen klinis dan lingkungan sesuai standar</b> 3 <b>Percentase Labkesmas yang dilakukan pembinaan secara rutin dan berjenjang</b>		
	1 Jumlah Rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium  2 Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/atau sampel  3 Percentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas  4 Mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME)  5 Jumlah MoU/PKS/Forum Kerjasama atau Forum Koordinasi dengan jejaring, lembaga/institusi nasional dan/atau internasional	Layanan deteksi dini dan respon kejadian penyakit menular  Pengadaan Alat dan Bahan Laboratorium  Sosialisasi dan Diseminasi Labkesmas Tk.Pusat (LP2)  Pemantapan Mutu Eksternal  Sosialisasi dan Diseminasi Labkesmas Tk.Pusat (LP2)	Pelaksanaan surveilans kesehatan berbasis laboratorium  Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium kesehatan  Pelaksanaan bimbingan teknis  Pelaksanaan penjaminan mutu laboratorium kesehatan  Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan

	6	Labkesmas memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepositori	Pemeliharaan Alat Penyelenggaraan Labkesmas	Pengelolaan biorepositori	
	7	Jumlah Labkesmas sesuai standar di wilayah binaan	Koordinasi dalam Penguatan Labkesmas (LP2)	Pelaksanaan penjaminan mutu laboratorium kesehatan	
Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program Ditjen Kesehatan Masyarakat	1	<b>Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Kesehatan masyarakat</b>			
	2	<b>Nilai Kinerja Penganggaran Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat</b>			
	1	Persentase realisasi anggaran	Layanan Manajemen Keuangan  Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan	
	2	Nilai Kinerja Anggaran	Koordinasi LP/LS evaluasi program  Layanan BMN  Layanan Umum  Layanan Perkantoran  Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Penyusunan rencana, program dan anggaran	
	3	Kinerja Implementasi WBK Satker	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi  Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Pengelolaan data dan informasi	
	4	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Layanan Manajemen SDM  Layanan Pendidikan dan Pelatihan	Pengelolaan data dan informasi  Pelaksanaan urusan administrasi UPT Bidang Labkesmas	

		Pelatihan Bidang Kesehatan	
--	--	----------------------------	--

## V. GAMBARAN KESESUAIAN DENGAN RAK

Cita-cita Indonesia dalam RPJPN 2025-2045, yaitu Indonesia Emas 2045 dijabarkan dalam RPJMN 2025-2029 menjadi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Selaras dengan visi pada RPJMN 2025-2029, Kementerian Kesehatan menetapkan visi 2025-2029, yaitu Masyarakat Yang Sehat Dan Produktif Guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Kementerian Kesehatan melaksanakan Misi (*Asta Cita*) Presiden dan Wakil Presiden Periode 2025-2029 terutama pada Asta Cita nomor 4, yaitu “*memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas*”. Asta cita tersebut dituangkan dalam RPJMN 2025-2029 sebagai Prioritas nasional (PN) ke-4 dalam RPJMN. Untuk mendukung PN 4 pada RPJMN dan mewujudkan Visi Kementerian Kesehatan Periode 2025-2029, maka ditetapkan Misi Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat sehat pada seluruh siklus hidup
2. Membudayakan gaya hidup sehat
3. Memenuhi layanan kesehatan yang berkualitas, baik, adil, dan terjangkau
4. Mengimplementasikan sistem ketahanan kesehatan yang tangguh dan responsive
5. Menguatkan tata Kelola dan pendanaan kesehatan nasional yang berkecukupan, adil dan berkelanjutan
6. Mengembangkan teknologi kesehatan yang maju
7. Mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif dan efisien

Transformasi layanan primer merupakan salah satu pilar transformasi kesehatan yang telah dicanangkan oleh Menteri Kesehatan. Laboratorium Kesehatan menjadi sasaran dalam pilar transformasi tersebut. Sejalan dengan itu, maka Kementerian Kesehatan mulai melakukan penataan ulang laboratorium kesehatan yang ada di Indonesia yang diklasifikasikan menjadi laboratorium medis dan laboratorium kesehatan masyarakat.

Salah satu program prioritas transformasi layanan primer yaitu revitalisasi struktur dan jejaring layanan kesehatan primer serta laboratorium kesehatan masyarakat. Laboratorium kesehatan masyarakat berfokus pada tindakan preventif, surveilans berbasis laboratorium, dan deteksi dini terhadap penyakit di masyarakat serta berperan dalam melakukan pemeriksaan terhadap vektor atau binatang pembawa penyakit dan pemeriksaan lingkungan yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat.

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Ambon Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal (Ditjen) Kesehatan Primer dan Komunitas Tahun 2025 - 2029 Guna mendukung visi, misi presiden dan tujuan strategis Kementerian Kesehatan serta sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai UPT Laboratorium Kesehatan Masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023, Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Ambon menetapkan tujuan strategis yaitu "**Mewujudkan peningkatan akses dan tata kelola pelayanan kesehatan primer melalui Pengembangan dan peningkatan peran laboratorium kesehatan masyarakat dalam deteksi dan respons penyakit**".

Kebijakan diatas diharapkan dapat mengarahkan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Ambon untuk mencapai tujuan : Mewujudkan masyarakat sehat melalui penguatan layanan kesehatan primer yang mudah diakses, berorientasi pada pencegahan, serta memberdayakan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat di seluruh tahapan usia.

Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat tersebut, dibutuhkan program kesehatan yang bersifat preventif dan promotif, salah satunya adalah Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Berbagai kegiatan telah dilakukan untuk mendukung pencegahan dan pengendalian penyakit di wilayah, dilaksanakan berbagai program salah satunya adalah Surveilans berbasis laboratorium yang tergambar pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3. Gambaran Kesesuaian RAK dan IKK Tahun 2025**

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		
1	Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya jumlah dan kemampuan pemeriksaan specimen kesmas, kesling dan biologi kesehatan	1	Percentase Labkesmas yang melaksanakan fungsi surveilans penyakit dan faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium sesuai standar	
			2	Percentase Labkesmas yang melaksanakan pemeriksaan specimen klinis dan lingkungan sesuai standar	
			3	Percentase Labkesmas yang dilakukan pembinaan secara rutin dan berjenjang	
2	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya dukungan manajemen pelaksanaan tugas lainnya	1	Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Kesehatan masyarakat	
			2	Nilai Kinerja Penganggaran Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat	

## VI. ANALISIS SMART

Dalam mencapai indikator kinerja, telah memenuhi kriteria SMART dari Kemenpan RB yaitu :

1. **Specifik** : Tidak multitafsir
2. **Measurable** : Dapat diukur, dapat diidentifikasi satuan atau parameternya
3. **Achievable** : Dapat dicapai, relevan dengan tugas dan fungsinya dan dalam kendalinya (*controllable*)
4. **Relevance** : Terkait langsung dengan (merepresentasikan) apa yang akan diukur
5. **Timebound** : Mengacu atau menggambarkan kurun waktu tertentu

## VII. KESIMPULAN

- a. IKU/IKK Balai Labkesmas Ambon telah selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi Balai Labkesmas Ambon sesuai PMK 25 Tahun 2023.
- b. IKU/IKK Balai Labkesmas Ambon telah selaras dengan Rencana Aksi Kegiatan 2025-2029
- c. IKU/IKK Balai Labkesmas Ambon telah memenuhi kriteria SMART dari Kemenpan RB
- d. Penetapan IKU/IKK 2024 memperhatikan capaian kinerja tahun sebelumnya

Ambon, Februari 2025

